

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Qatar adalah negara yang memiliki pengaruh kuat di Timur Tengah. Pengaruh negara ini adalah mereka memiliki *bargaining position* yang tangguh di kawasan itu dikarenakan tingkat perekonomiannya yang mumpuni. Pada tahun 2016 sebelum terjadi krisis diplomatik di kawasan Teluk Arab, GDP(*Gross Domestic Product*) perkapita Qatar adalah sebesar 58.246,65 Dollar Amerika Serikat. Hal ini menjadikan Qatar sebagai negara dengan tingkat GDP perkapita salah-satu yang tertinggi di dunia (Masfiya, 2018). Perhatian dunia internasional tertuju kepada Qatar pada pertengahan tahun 2017. Pada saat itu, konflik antara Qatar dengan negara-negara di Timur Tengah pecah dengan putusannya hubungan diplomatik antara Qatar dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir.

Keretakan hubungan antara Qatar dan negara-negara ini sebenarnya bisa dilacak sejak saat 1995, saat itu Qatar yang dipimpin oleh Hamad bin Khalifa al-Thani perlahan menjelma menjadi negara yang memiliki pengaruh di kawasan Arab. Sebelum pemerintahannya, Qatar sangatlah dekat hubungannya dengan Arab Saudi. Tapi saat ia naik tahta menjadi Emir saat mengkudeta ayahnya sendiri, hubungan Qatar-Arab Saudi menjadi lebih renggang dan banyak keputusannya yang tidak disukai oleh Arab Saudi. Faktor determinan yang mempengaruhi hubungan antara kedua negara ini adalah kecenderungan Qatar akan kebijakan luar negerinya yang bertolak-belakang dengan kebijakan Arab Saudi. Selain itu Qatar juga berusaha untuk lebih “mandiri” dengan melepas dikte dari Arab Saudi yang sebelumnya cukup kuat terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri Qatar (Cahyani, 2019). Hal ini kemudian membuat hubungan antara Qatar dengan Negara-

Negara Arab lainnya juga kurang harmonis karena sebagian negara-negara itu pro terhadap Arab Saudi.

Ketegangan antara Qatar dengan negara-negara Arab tidak pernah benar-benar reda. Pada Bulan Maret 2014, Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab menarik duta besarnya dari Doha karena tuduhan Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh mereka. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama, pada November 2014 ketiga negara tersebut mengembalikan duta besarnya ke Doha atas mediasi Kuwait (Debora, 2017). Ketegangan kembali terulang pada 24 Mei tahun 2017, kantor berita Qatar, *Qatar News Agency* menayangkan berita bahwa Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani memberikan sambutan dalam sebuah upacara militer dan kemudian menyebutkan bahwa Iran adalah kekuatan besar. Dalam kutipan tersebut, Emir Qatar mengatakan bahwa Iran merupakan kekuatan regional serta representasi Islam yang tidak bisa diabaikan demi stabilitas di kawasan Teluk Arab. Sehingga tindakan yang mendiskreditkan Iran tidaklah bijaksana. (kumparan, 2017). Selain itu, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani dalam siaran itu juga menyatakan dukungan terhadap Hamas dan Hizbullah serta Israel. Aliansi Arab Saudi menganggap bahwa Hamas dan Hizbullah sebagai gerakan teroris (Tumanggor & Arifin, 2019).

Pemerintah Qatar kemudian mengklarifikasi bahwa cuplikan berita *Qatar News Agency* yang memuat pernyataan emir mereka tersebut merupakan *hoax* dan merupakan hasil peretasan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Namun peristiwa tersebut terlanjur membuat suasana memanas karena aliansi Arab Saudi notabene kontra dengan Iran. Aliansi itu juga kembali menganggap Qatar mendukung dan mengakomodasi kelompok teroris. Selain itu, media milik Pemerintah Qatar, “Al Jazeera”, dianggap terlalu sering mencampuri urusan pemerintah negara-negara Timur Tengah lain sehingga mengganggu stabilitas kawasan. Akibat dari hal tersebut, pada tanggal 5 Juni 2017, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan diikuti oleh Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan

Qatar. Mereka kemudian memutus semua kerjasama dan mengembargo Qatar dalam berbagai sektor. Pemutusan hubungan kerjasama dan embargo ini antara lain yaitu menutup dan menghentikan semua kegiatan perdagangan dengan Qatar, menutup jalur perbatasan dengan Qatar, melarang pesawat udara Qatar melintas dan mendarat di wilayah Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir, serta mengucilkan Qatar dalam forum-forum yang diikuti bersama seperti Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, dan Dewan Kerjasama Teluk. (Nurhafiza, 2019).

Apa yang dilakukan oleh Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir diatas bukanlah tanpa alasan. Mereka tentu telah menghitung dampak yang kira-kira akan diterima Qatar dari embargo dan pemutusan kerjasama ini. Dalam penghentian semua kegiatan perdagangan dengan Qatar, hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan Qatar akan barang-barang import dari negara lain. Sekitar 10,16% bahan pangan rakyat Qatar pada tahun 2016 adalah berasal dari Arab Saudi (Nurhafiza, 2019). Dalam hal penutupan perbatasan, Qatar praktis dipaksa hanya bisa menyuplai barang-barang kebutuhan negaranya lewat laut dan udara dari negara selain Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Tidak cukup sampai disitu, Arab Saudi pun memperkenalkan proyek Kanal Salwa. Proyek ini merupakan usaha pengerukan daerah perbatasan darat dengan Qatar untuk dijadikan kanal, Arab Saudi berdalih bahwa proyek ini dilakukan untuk mendukung pelayaran dan pariwisata. Proyek ini bisa membuat Qatar semakin terisolasi karena membuat Qatar menjadi pulau tersendiri yang terpisah dari Semenanjung Arab (Firman, 2018)

Hal-hal yang dilakukan oleh aliansi Arab Saudi diatas ditujukan untuk menekan dan memengaruhi kebijakan luar negeri Qatar supaya sesuai dengan tuntutan mereka. Salah-satu dari tuntutan tersebut antara lain adalah menuntut Qatar menghentikan hubungan dengan Iran (Ferida, 2017). Namun Pemerintah Qatar menolak keras hal tersebut dan enggan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dari Aliansi Arab Saudi. Juru

bicara pemerintah Qatar, Syeikh Saif bin Ahmed al-Thani bahkan mengatakan bahwa blokade maupun tuntutan itu melanggar kedaulatan Qatar dan tidaklah dimaksudkan untuk memerangi terorisme serta bukan untuk menjaga stabilitas kawasan, tetapi ditujukan untuk mengintervensi urusan Pemerintah Qatar (Hardoko, 2017).

Adanya kejadian ini membuat Qatar menyadari bahwa keamanan mereka berada dalam posisi rawan karena mereka menolak tuntutan aliansi Arab Saudi dan bersikukuh mempertahankan kebijakan-kebijakannya. Bahkan beberapa pekan setelah terjadinya krisis ini tahun 2017, aliansi Arab Saudi pernah hampir merealisasikan invansi militer ke wilayah Qatar walaupun pada akhirnya rencana tersebut harus dibatalkan karena tekanan dari Rex Tillerson (Menteri Luar Negeri Amerika Serikat waktu itu) (Emmons, 2018). Pada saat itu kekuatan militer Qatar jauh berada dibawah aliansi Arab Saudi sehingga sangat berbahaya apabila terjadi invasi ataupun perang terbuka. (Wardoyo, 2018).

Kondisi keamanan yang berada dibawah bayang-bayang aliansi Arab Saudi membuat Qatar berusaha untuk memperkuat pertahanan negara dan mencegah tindakan militer dari aliansi tersebut yang sewaktu-waktu bisa terjadi serta tidak dapat diprediksi. Menteri Pertahanan Qatar, Dr. Khalid bin Mohammad al-Attiyah mengatakan bahwa negaranya perlu untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan demi untuk mencegah ancaman dengan memperkuat sistem pertahanan Qatar dengan berbagai cara. Dalam pernyataannya, Ia mengatakan:

*“We want to stop calling 911 every time we have a crisis in the region and put the burden on our friends and allies. We want to do this with them side by side if anything happens. This is one of the reasons we are enhancing our capabilities. Secondly, we believe strongly that stability and prosperity need deterrent to maintain them and keep them long lasting. We are not seeker of war. We are seeker of peace, development and*

*prosperity. But alongside this, we need to have a deterrent force to keep the stability intact.*" (Tribune, 2018).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Qatar kemudian melaksanakan strategi-strategi pertahanan yang akan dibahas lebih lanjut di skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dijawab dalam skripsi ini adalah "Bagaimana strategi pertahanan Qatar dalam menghadapi ancaman invasi aliansi Arab Saudi saat krisis diplomatik tahun 2017-2019?"

## **C. Kerangka Pemikiran**

Dalam membantu mengkaji topik penelitian tentang bagaimana strategi pertahanan Qatar dalam menghadapi ancaman invasi aliansi Arab Saudi saat krisis diplomatik tahun 2017-2019, penulis menggunakan kerangka pemikiran berupa konsep-konsep. Adapun konsep yang penulis gunakan adalah sebanyak dua konsep yang termasuk kedalam arus pemikiran perspektif keamanan tradisional. Konsep tersebut adalah Konsep *Balance of Power* dan Konsep Aliansi.

### **1. Konsep Balance of Power**

*Balance of power* dapat didefinisikan sebagai sebuah mekanisme dalam hubungan internasional untuk mencegah dominasi dari suatu negara terhadap negara lain. Mekanisme ini bisa terjadi secara kebetulan atau sengaja diusahakan oleh suatu negara untuk kelangsungan hidupnya. (Steans & Pettiford, 2009).

*Balance of power* berhubungan dengan teori realisme. Menurut kaum Realis, masalah utama dalam hubungan internasional salah satunya adalah anarkhi. *Balance of*

*power* yang diusahakan oleh negara bisa terjadi karena berlakunya sistem dunia yang anarkhi ini. Sistem ini membuat tatanan dunia tidak memiliki “pimpinan” sehingga hal buruk bisa terjadi kepada negara akibat perilaku negara lain. Akibatnya, negara mengusahakan keamanan dirinya sendiri dengan meningkatkan dan menyeimbangkan kekuatannya dengan negara lain. Aspek dari *balance of power* ini bisa terdiri dari militer, politik, bahkan ekonomi. (T.V, James, & Fortmann, 2004).

Ketidakeimbangan kekuatan di suatu regional akan membuat negara yang lebih kuat bisa mengancam negara lain yang lemah. Hal ini bisa terjadi karena negara tersebut secara alamiah akan berperilaku agresif karena tidak ada yang mengimbangnya. Cara untuk menanggulangi hal tersebut adalah negara yang kekuatannya lebih lemah bisa membentuk aliansi dengan negara lain yang juga memiliki kekuatan, baik di dalam regional itu maupun di luar. Selain itu, negara yang lebih lemah itu bisa membangun, memperbanyak dan memodernisasi alutsistanya baik secara mandiri maupun dengan bantuan dari luar negeri. (T.V, James, & Fortmann, 2004)

Konsep ini akan menjelaskan bagaimana Qatar berusaha untuk menyeimbangkan kekuatannya dengan aliansi Arab Saudi dalam konteks militer dan pertahanan. Ini dilakukan untuk mencegah aliansi itu agar tidak melakukan ancaman lebih lanjut kepada Qatar. Dalam usaha tersebut, secara garis besar Qatar melakukan *balancing*. Menurut Kenneth Waltz, *balancing* dalam Konsep *Balance of Power* dapat dipahami sebagai tindakan negara untuk mempertahankan kedudukannya di dalam sebuah sistem (Waltz, 1979). Hal yang senada diungkapkan oleh Randall L. Schweller, menurutnya *balancing* diperlukan oleh sebuah negara untuk mempertahankan diri dan melindungi nilai-nilai (Schweller, 1994). Dari pemikiran para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa perilaku *balancing* sebuah negara

dimotivasi oleh keinginan untuk melindungi diri dari ancaman kekuatan lawan.

Implementasi perilaku *balancing* ini dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara internal dan secara eksternal. *Balancing* secara internal dilakukan oleh sebuah negara dengan meningkatkan dan menguatkan sumber daya dalam negerinya. Sedangkan *balancing* secara eksternal dilakukan dengan cara beraliansi bersama kekuatan lain (Ambarwati, Mahroza, & Supandi, 2019)

Di dalam skripsi ini, usaha *balancing* internal yang dilakukan oleh Qatar adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas alutsista dan teknologi pertahanan, serta personel militer. Sedangkan *balancing* eksternal yang dilakukan oleh Qatar adalah dengan cara beraliansi dengan kekuatan lain, yaitu Amerika Serikat, Iran, dan Turki.

## 2. Konsep Aliansi

Aliansi dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk asosiasi suatu negara dengan negara/kumpulan negara lain. Dalam Ilmu Hubungan Internasional, asosiasi yang mendasari aliansi dimotivasi oleh semangat untuk memperkuat negara dan/ menghadapi ancaman eksternal. Hal ini sejalan dengan pendapat Stephen M. Walt, bahwa hipotesa utama mengapa suatu negara memilih beraliansi adalah ditujukan untuk menyeimbangkan kekuatan dengan negara yang paling mengancamnya (WALT, 1987). Secara lebih khusus, Jack C. Plano dan Roy Olto dalam “Kamus Hubungan Internasional” menulis bahwa aliansi merupakan perjanjian untuk saling menyokong secara militer jika suatu negara diserang oleh negara lain.

Sejatinya aliansi adalah bentuk pragmatisme suatu negara dalam upaya mencapai kepentingannya. Perbedaan antar negara-negara yang beraliansi bisa dimarginalkan demi solidnya suatu aliansi. Bahkan pentingnya perbedaan

ideologis antar negara aliansi akan semakin menurun jika ancaman terhadap aliansi semakin menguat (WALT, 1987).

Aliansi dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Selain itu, aliansi juga dapat bersifat rahasia atau terbuka, sederhana atau terorganisir, maupun jangka panjang atau pendek. Beraliansi adalah hal lumrah dalam tatanan internasional dan memiliki dasar hukum dalam Pasal 51 Piagam PBB tentang pengakuan hak untuk membela diri secara kolektif (Gusfianda & Indrawati, 2017)

Menurut T. May Rudy dalam “Study Startegis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin”, terdapat 3 bentuk utama yang menjelaskan mengapa dan bagaimana aliansi dilakukan (Gusfianda & Indrawati, 2017). Berikut ini adalah tabel bentuk-bentuk dari aliansi:

**Tabel 1. 1 Bentuk-Bentuk Aliansi**

| <i>Augmentive</i>  | <i>Pre-emptive</i>   | <i>Strategic</i>   |
|--|--|--|
| Negara A beraliansi dengan negara B untuk menambahkan kekuatan B terhadap kekuatan A dalam rangka bersama-sama menghadapi kekuatan lawan. Tujuannya agar kekuatan A+B lebih unggul atau sekurang-kurangnya sama dengan kekuatan lawan (C). | Negara A beraliansi dengan negara B untuk memisahkan B dari kubu lawan (C) atau untuk mengurangi kekuatan pihak lawan (C). | Negara A beraliansi dengan negara B untuk dapat memanfaatkan berbagai sarana yang dimiliki oleh negara B bagi tujuan strategisnya. |

*Sumber:* (Gusfianda & Indrawati, 2017)



Di dalam pembahasan skripsi ini, konsep aliansi akan menjelaskan bagaimana Qatar berasosiasi dengan Amerika Serikat, Iran, dan Turki. Aliansi antara Qatar dengan negara-negara tersebut dilakukan untuk menghadapi ancaman invasi dari aliansi Arab Saudi saat krisis diplomatik tahun 2017-2019. Sesuai dengan model bentuk-bentuk aliansi diatas, Qatar dalam hal ini melakukan *Augmentative*, *Pre-emptive* dan *Strategic*.

#### **D. Hipotesa**

Dengan dibantu oleh kerangka pemikiran yang dihubungkan dengan rumusan masalah “Bagaimana strategi pertahanan Qatar dalam menghadapi ancaman invasi aliansi Arab Saudi saat krisis diplomatik tahun 2017-2019?”, penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut:

Strategi pertahanan Qatar dalam menghadapi ancaman invasi aliansi Arab Saudi adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem pertahanan guna mencegah aliansi tersebut melakukan tindakan militer kepada Qatar. Selain itu, Qatar juga menjalin aliansi dan kerjasama kemiliteran dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Iran, dan Turki untuk menyeimbangkan kekuatan dengan aliansi Arab Saudi guna meminimalisir ancaman militer.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ancaman invasi aliansi Arab Saudi kepada Qatar saat krisis diplomatik tahun 2017-2019 terjadi;
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pertahanan Qatar pada tahun 2017-2019;

3. Untuk menjelaskan bagaimana strategi pertahanan Qatar dalam menghadapi ancaman invasi aliansi Arab Saudi saat krisis diplomatik tahun 2017-2019.

## **F. Batasan Penelitian**

Untuk mempermudah penelitian, skripsi “Strategi Pertahanan Qatar dalam Menghadapi Ancaman Invasi Aliansi Arab Saudi saat Krisis Diplomatik Tahun 2017-2019” ini memiliki batasan dari tahun 2017 saat krisis diplomatik antara Qatar dengan aliansi Arab Saudi bermula, sampai dengan tahun 2019 dimana krisis ini masih berlangsung dan aliansi Arab Saudi bisa sewaktu-waktu menginvasi Qatar.

Pembahasan dalam skripsi ini juga dibatasi hanya pada melihat bagaimana strategi pertahanan yang telah dilakukan oleh Qatar dalam merespon ancaman dari aliansi Arab Saudi tanpa memperhitungkan hasil akhir dari keberhasilan strategi tersebut.

## **G. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang interpretatif dan naturalistik dalam melihat dunia. Hal ini mengartikan bahwa penelitian kualitatif akan mempelajari objek penelitian dalam keadaan alamiah mereka, kemudian objek tersebut akan berusaha dipahami dan diinterpretasikan ke dalam konteks makna (Bakry, 2019).

Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada *meanings* dan *understanding* dibandingkan kuantifikasi. Penelitian jenis ini akan lebih memudahkan untuk memahami fenomena, aktivitas, dan proses-proses sosial. Dengan sifatnya yang demikian, penelitian kualitatif akan membantu peneliti untuk

menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren (Bakry, 2019).

Data-data dalam menyusun skripsi ini didapatkan melalui metode pengumpulan data berbasis dokumen. Menurut Christopher Lamont, dokumen dalam penelitian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer adalah dokumen asli atau dokumen yang memiliki akses langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan dokumen sekunder adalah dokumen yang tidak memiliki akses langsung terhadap objek penelitian, tetapi dokumen tersebut mengacu kepada dokumen primer.

Dokumen primer dalam skripsi ini berasal dari situs resmi lembaga negara dan lembaga non-negara yang terkait objek penelitian. Sedangkan dokumen sekunder didapatkan dari buku-buku, artikel-artikel jurnal, dan hasil penelitian lainnya. Selain itu, dokumen elektronik seperti berita-berita dan situs-situs di internet juga digunakan untuk mendukung dokumen yang telah disebutkan sebelumnya karena sifatnya yang memuat informasi faktual.

## **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi “Strategi Pertahanan Qatar dalam Menghadapi Ancaman Invasi Aliansi Arab Saudi saat Krisis Diplomatik Tahun 2017-2019” ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

BAB I berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, batasan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan berisi pembahasan tentang skripsi. Bagian ini akan memuat dua sub bab, sub bab pertama yaitu tentang ancaman invasi terhadap Qatar. Sedangkan sub bab kedua akan berfokus kepada pembuktian hipotesa tentang bagaimana

strategi pertahanan Qatar dalam menghadapi ancaman invasi dari aliansi Arab Saudi saat krisis diplomatik 2017-2019.

BAB III akan berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini.